

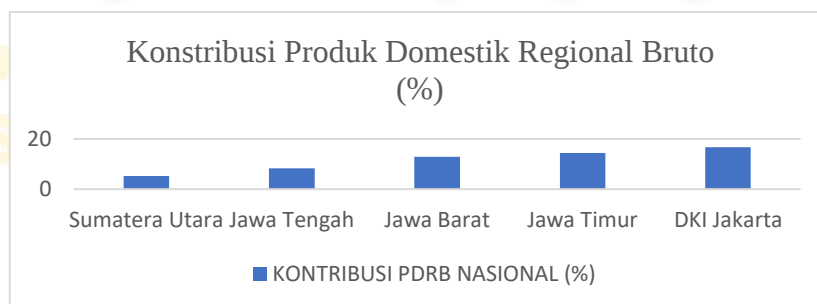
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

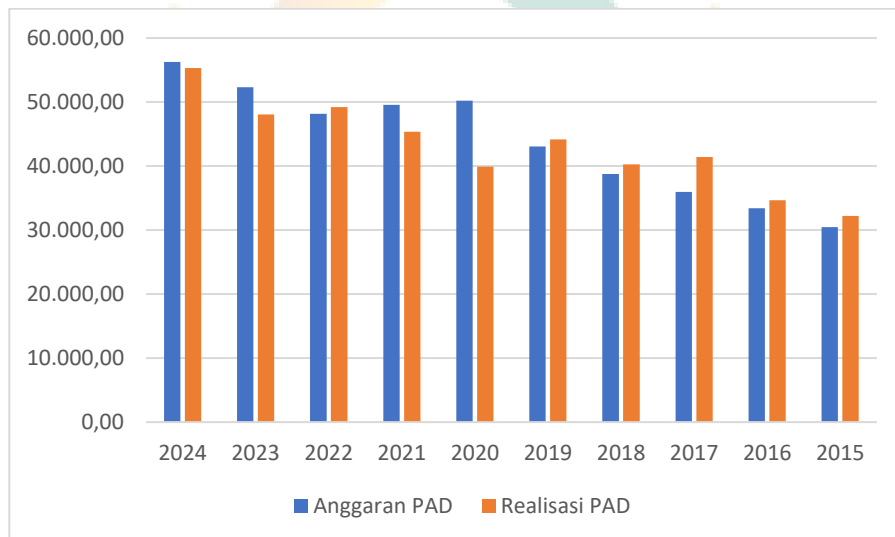
Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat dengan proses peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berjalan baik dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang intens dan berkelanjutan (Riani & Iryani, 2023).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, khususnya pendekatan Keynesian, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat menstimulus permintaan agregat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Ambarita & Siregar, 2025). Peningkatan output yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh kenaikan permintaan agregat, investasi, belanja pemerintah, serta produktivitas faktor-faktor produksi. Ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, hal ini menandakan adanya ekspansi kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi, sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.



Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang produktif secara perekonomian, dengan kontribusi signifikan pada tahun 2024 dalam total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Namun, pada data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada Gambar 1.2, penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan dan bergantung pada dana alokasi umum. Ketimpangan ini menandakan bahwa potensi fiskal daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efisien.



Gambar 1. 2 Perbandingan anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2024

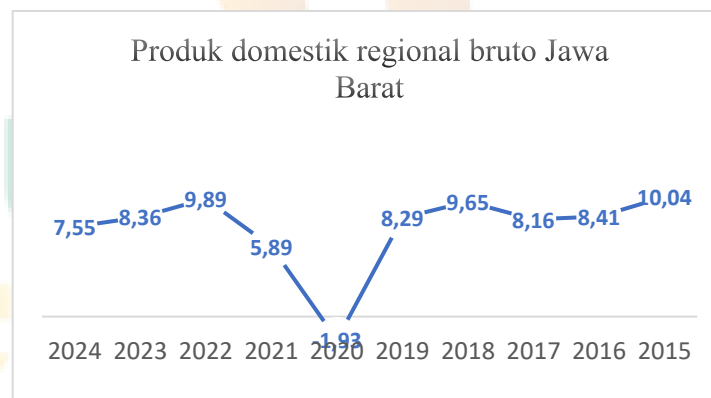
Sumber: Kementerian Keuangan

Menurut Maqin (2011), percepatan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, baik dalam bentuk investasi langsung pada sektor produktif maupun investasi sosial seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Namun, tantangan baru muncul ketika adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD yang menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi belanja pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah

untuk mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan ekonomi.

Miskiyah et al. (2022) menyatakan bahwa pemerintah berfungsi meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menjaga keadilan distribusi pendapatan, serta memastikan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Pandangan ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi ekonomi.

Pada pemikiran John Maynard Keynes, campur tangan pemerintah dapat menstabilkan perekonomian (Juliyanto et al., 2024). Dalam pandangan Keynes, fluktuasi ekonomi tidak semata-mata diatur oleh mekanisme pasar, melainkan distabilkan oleh intervensi aktif pemerintah, khususnya melalui kebijakan fiskal. Teori Keynesianisme memperkenalkan konsep dampak berganda atau *multiplier effect* dari pengeluaran pemerintah. Dampak ini terjadi ketika kenaikan pengeluaran pemerintah menstimulasi peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat (Nurhayana & Soebagiyo, 2023). Tabel 1.2 di bawah menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2024.

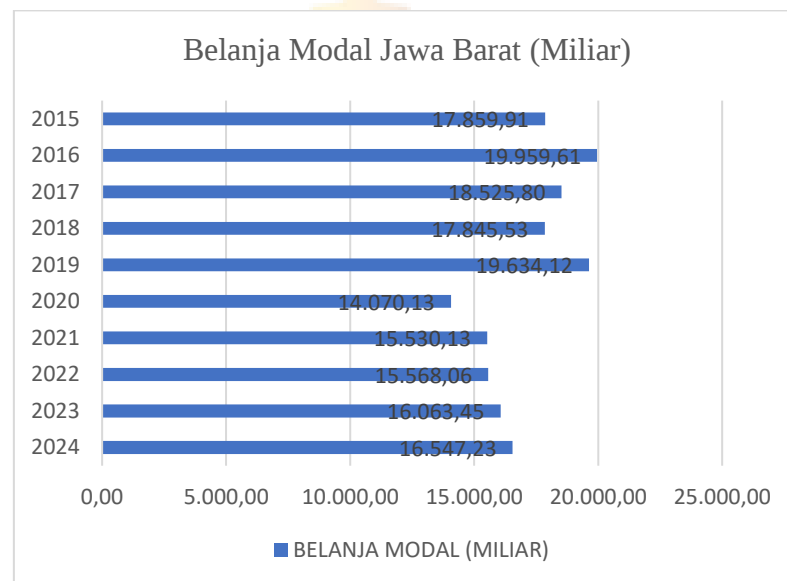


Gambar 1. 3 Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Barat tahun 2015-2024

Sumber: Badan Pusat Statistika

Gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sempat menyentuh titik tertinggi pada tahun 2015 sebesar 10,04%, namun mengalami penurunan

signifikan hingga mencapai 1,93% pada tahun 2020. Fenomena ini terjadi karena melemahnya permintaan efektif saat pandemi covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting melalui kebijakan fiskalnya, untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Belanja pemerintah khususnya belanja modal, merupakan jenis belanja yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki efek pengganda yang besar (Aditya et al., 2024).



Gambar 1. 4 Belanja Modal di Jawa Barat tahun 2015–2024

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 1.4, belanja modal Jawa Barat tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi pada kisaran 14 hingga 20 triliun rupiah. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan nilai mencapai 19,95 triliun rupiah, sedangkan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 14 triliun rupiah. Penurunan drastis pada tahun 2020 ini sejalan dengan adanya kontraksi ekonomi, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat yang mengalami penurunan sebesar 1,93% pada tahun yang sama. Namun, seiring dengan kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, alokasi belanja modal kembali didorong. Hal ini terbukti berkontribusi pada pemulihan perekonomian, yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara bertahap dari 2021 hingga 2024.

Secara konseptual, belanja modal memang dipandang sebagai instrumen penting untuk pertumbuhan jangka panjang, sebab merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Digdowiseiso, 2021). Peningkatan alokasi belanja modal pasca-COVID-19 mencerminkan respons kebijakan ekspansif pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Setelah pemerintah meningkatkan belanja dan mendorong stimulus fiskal, perekonomian mulai pulih. Pada tahun 2021, terbukti pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami kenaikan secara bertahap dari 2021 hingga 2024. Meskipun demikian, temuan empiris mengenai dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak seragam. Penelitian oleh Arini & Kusuma (2019), serta Ernawati (2024) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, penelitian (Digdowiseiso, 2021) serta Widiyanto et al. (2016), justru memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterkaitan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang salah satunya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siregar (2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah.

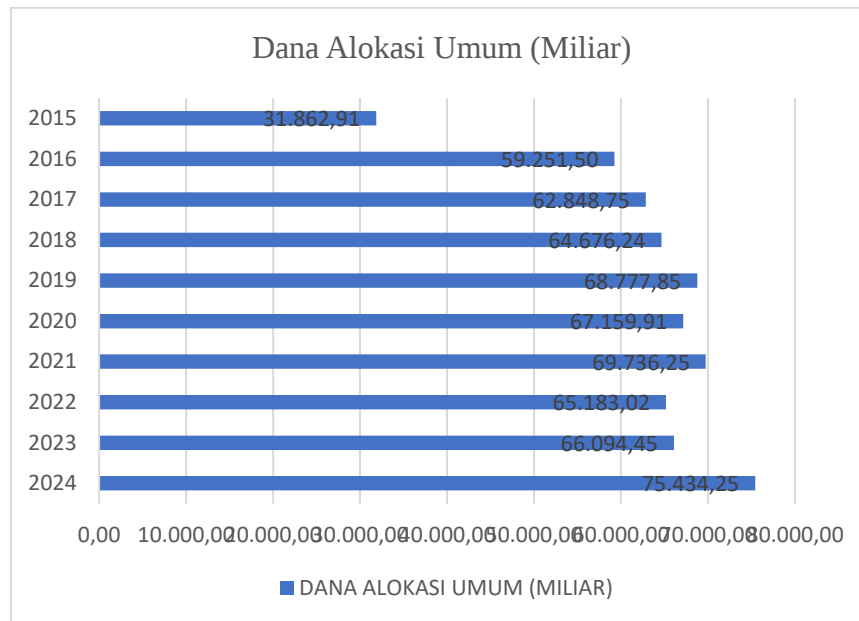


Gambar 1. 5 Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2015–2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat periode 2015 hingga 2024 memiliki tren meningkat, yang menggambarkan penguatan kapasitas fiskal dan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar 32,19 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 55,33 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Secara teoretis, peningkatan kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kajian empiris mengenai kaitan ini menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2016) dan Anggurela et al. (2025) mendukung pandangan tersebut, dengan temuan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian, Ladjin et al. (2023) menemukan hasil berbeda, yaitu bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan pengaruh signifikan (baik kenaikan maupun penurunan) pada pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah sekaligus menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. (Anggurela et al., 2025). Dengan demikian, berarti terdapat hubungan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. 6 Dana Alokasi Umum di Jawa Barat tahun 2015–2024

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.6 memperlihatkan tren Dana Alokasi Umum (DAU) yang cenderung meningkat pada periode 2015-2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Data tahun 2022 tersebut menunjukkan penyimpangan yang tidak mendukung hipotesis hubungan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pada periode yang sama, yaitu tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat justru mengalami peningkatan, sementara alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan. Fenomena di Jawa Barat ini mencerminkan perdebatan akademis yang masih berlangsung mengenai dampak DAU, di mana hasil penelitian tidak seragam. Di satu sisi, penelitian (Anggurela et al., 2025) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, temuan Widiyanto et al. (2016), serta Setiyawati & Hamzah (2017), justru menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan riset mengenai kebijakan-kebijakan fiskal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian ini, yaitu “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Periode 2015–2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih fluktuatif, dengan puncak 10,04% pada tahun 2015 dan penurunan drastis menjadi minus 1,93% pada tahun 2020 akibat pandemi. Meskipun pasca 2021 menunjukkan pemulihan, laju pertumbuhan belum seragam di seluruh daerah, menandakan masih adanya ketimpangan dalam efektivitas kebijakan fiskal antarwilayah.
2. Belanja modal Jawa Barat mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2015–2024, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 hingga hanya mencapai Rp14 triliun akibat kontraksi ekonomi. Meskipun pasca pandemi terjadi peningkatan belanja, pengelolaannya masih belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan fiskal dan hasil di lapangan.
3. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari Rp32,19 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp55,33 triliun pada tahun 2024, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum menunjukkan dampak signifikan dalam pemerataan ekonomi antarwilayah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode tahun 2020-2024 juga, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif berada di bawah target yang telah dianggarkan. Meskipun pada tahun 2022 berada di atas target, pada tahun 2023 kembali berada di bawah target yang telah dianggarkan.

4. Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, pada tahun 2022, ketika DAU menurun sementara, pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Fenomena ini menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) belum secara konsisten berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

C. Pembatasan Masalah

Agar tetap terjaga keefektifan waktu, dan memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara yang selaras dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan berpusat pada pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024?
4. Apakah belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024.

4. Untuk menganalisis belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat periode 2015–2024?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari selesainya penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman pembelajaran yang luar biasa yang mengajari penulis cara mengenali masalah dan cara menyelesaikannya menggunakan pengetahuan terkait pengaruh yang telah diteliti.

2. Bagi akademisi dan keilmuan

Penelitian ini dapat menambah sarana informasi dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi